

 KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA BPSDM HUKUM DAN HAM SEKRETARIAT	NOMOR SOP	SDM-211-OT.02.02 TAHUN 2024
	TANGGAL PEMBUATAN	25 JUNI 2024
	TANGGAL REVISI	
	TANGGAL EFEKTIF	
	DISAHKAN OLEH	KEPALA BPSDM HUKUM DAN HAM,  RAZILU NIP 196511281991031002
NAMA SOP	STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENYUSUNAN RENCANA STRATEGIS	
DASAR HUKUM :		KUALIFIKASI PELAKSANA :
1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara 2 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2024 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional 3 Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional 4 Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2023 tentang Kementerian Hukum dan HAM 5 Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 28 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan HAM		1. Memahami tugas dan fungsi BPSDM Hukum dan HAM 2. Memiliki kemampuan analisa data, penyusunan rencana dan program 3. Mengetahui pengoperasian aplikasi persuratan SUMAKER
KETERKAITAN :		PERALATAN/PERLENGKAPAN :
1 SOP Penyusunan SK 2 SOP Surat Keluar		1. Komputer/Printer 2. Alat Tulis 3. Aplikasi persuratan SUMAKER
PERINGATAN :		PENCATATAN DAN PENDAFTARAN :
		Disimpan sebagai arsip dan dokumen pada website BPSDM Hukum dan HAM dan perpustakaan BPSDM Hukum dan HAM

NOMOR SOP	SDM-211-OT.02.02 TAHUN 2024
TANGGAL PEMBUATAN	25 JUNI 2024
TANGGAL EFEKTIF	

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENYUSUNAN RENCANA STRATEGIS

